

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses belajar yang bertujuan untuk mengasah potensi individu dalam hal pengetahuan, kemampuan, perilaku, serta nilai-nilai yang mendukung kehidupan. Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang berlangsung sepanjang hayat dan tidak terpisahkan dari kehidupan kapan saja dan di mana saja. Dalam proses pendidikan, terdapat sebuah aktivitas yang melibatkan interaksi antara peserta didik dan pendidik. Aktivitas ini dikenal dengan istilah pembelajaran, yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan, nilai, dan karakter bagi para peserta didik (Etika Sari et al., 2021: 2).

Pendidikan memegang peran penting dalam upaya membangun kemanusiaan yang beradab. Pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian individu dengan berlandaskan pada nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Peran pendidikan menjadi sangat penting, karena memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi individu. Selain itu, pendidikan juga berfungsi untuk membentuk sikap dan perilaku yang baik, di mana peserta didik yang terdidik akan memperoleh pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup yang semakin kompleks (Lathifah & Ndonga, 2024: 1).

Menurut Winkel (1991) Pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sengaja dan terstruktur melalui tindakan, bimbingan, serta arahan dari orang

dewasa kepada anak-anak untuk membantu mereka mencapai kedewasaan. Dalam istilah sederhana, pendidikan dapat diartikan sebagai proses pendewasaan diri. Proses pendidikan ini harus dilakukan oleh orang dewasa yang terdidik, sementara yang menjadi sasaran didik adalah anak-anak atau individu yang belum mencapai kedewasaan (Purnomo, 2019). Pendidikan merupakan proses yang dirancang secara terstruktur untuk mengembangkan kecerdasan individu dan meningkatkan kualitas hidup ke arah yang lebih baik (Muetya et al., 2022:2). Hakikat pendidikan adalah membentuk individu berkarakter kuat dalam menghadapi tantangan zaman. Sekolah berperan sebagai lembaga formal penyelenggara pembelajaran terstruktur (Azizah et al., 2023:5).

Sekolah merupakan tempat atau wadah pendidikan formal serta memainkan peran penting dalam perkembangan individu seseorang. Sekolah adalah tempat dimana siswa dan siswi menerima pendidikan baik akademik maupun non-akademik dalam lingkungan yang terorganisir. Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut merupakan beberapa tujuan dari adanya sekolah. Lingkungan sekolah yang terorganisir akan membantu siswa belajar disiplin dan tanggung jawab serta mempersiapkan mereka untuk karir atau pendidikan lanjutan. Lebih dari itu, sekolah memungkinkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki. Sekolah tidak hanya membantu perkembangan intelektual siswa, tetapi juga membangun karakter dan kepribadian mereka menjadi orang yang jujur dan produktif di lingkungannya (Dewantara et al., 2021).

Peran sekolah sangat penting untuk mendukung pertumbuhan akademik, karakter, dan keterampilan sosial siswa. Oleh karena itu sangat penting bahwa itu sekolah memiliki lingkungan yang aman, nyaman, dan damai. Lingkungan seperti menjaga siswa dari ancaman kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi, sehingga mereka dapat belajar tanpa takut. Kenyamanan di sekolah memungkinkan siswa untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mencapai potensi terbaik mereka. Sementara itu, suasana sekolah yang tenang mendorong hubungan yang positif antara siswa, pendidik, dan komunitas sekolah secara keseluruhan. Pada akhirnya, ini meningkatkan keinginan siswa untuk belajar. Sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk belajar tetapi juga tempat untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan seperti penghargaan, kerja sama, dan toleransi. Sekolah dapat membentuk generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan damai, diperlukan penanaman nilai-nilai kehidupan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antar warga sekolah. Salah satu nilai penting yang harus ditanamkan adalah toleransi dalam kebinekaan. Nilai ini menjadi fondasi penting dalam membangun suasana inklusif di mana setiap individu merasa dihargai meskipun memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Toleransi sangat penting untuk dibina di sekolah sebagai bagian dari proses interaksi sosial antar siswa. Pembentukan sikap toleran tidak hanya menekankan pengetahuan tentang benar dan salah, tetapi juga pada kesadaran serta penerapan nilai-nilai tersebut melalui pendekatan yang lembut, tegas, dan menyenangkan (Simanungkalit & Habeahan, 2024:5).

Untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang ideal, diperlukan upaya bersama dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk siswa, pendidik, dan orang tua. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga sebagai ruang bagi siswa untuk berkembang secara emosional dan sosial. Dengan dukungan yang tepat, siswa dapat merasa diterima dan dihargai apa pun latar belakang mereka. Namun, menciptakan lingkungan seperti ini membutuhkan perhatian terhadap berbagai tantangan yang muncul di sekolah, termasuk masalah-masalah yang dapat mengganggu keharmonisan dan kenyamanan, baik secara individu maupun kolektif.

Salah satu tantangan yang muncul di sekolah yang dapat mengganggu keharmonisan adalah diskriminasi. Pada dasarnya diskriminasi adalah perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan warna kulit, golongan atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya (Fulthoni et al., 2009). Diskriminasi di sekolah kerap menjadi isu yang sulit dikenali namun memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan siswa. Biasanya, diskriminasi ini muncul dalam bentuk perlakuan yang berbeda berdasarkan latar belakang sosial, agama, kemampuan akademik, atau kondisi ekonomi siswa. Tidak hanya terjadi antar siswa, diskriminasi ini juga sering dilakukan tanpa disadari oleh tenaga pendidik. Akibatnya, lingkungan belajar yang seharusnya mendukung pertumbuhan siswa justru menjadi kurang mendukung dan tidak inklusif. Diskriminasi ini sering kali menjadi pemicu terjadinya perundungan, karena perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu mendorong munculnya sikap agresif dari pihak yang lebih kuat

terhadap yang lebih lemah. Dengan kata lain, diskriminasi menciptakan ketimpangan yang berpotensi memunculkan perundungan sebagai bentuk kekuasaan dan dominasi (Sitanggang et al., 2024:7). Diskriminasi merupakan perlakuan tidak adil yang dapat menimbulkan dampak negatif, termasuk dalam lingkungan pendidikan (Fahrul & Ahmad, 2023:4).

Diskriminasi di lingkungan sekolah dapat berdampak buruk pada kesejahteraan siswa, baik secara psikologis, akademis, maupun sosial. Siswa yang mengalami diskriminasi sering merasa tidak dihargai, kehilangan rasa percaya diri, dan rentan terhadap stres atau depresi. Hal ini dapat menghambat motivasi belajar, menurunkan prestasi akademik, serta membuat mereka enggan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Secara sosial, diskriminasi menciptakan isolasi dan mempersulit siswa menjalin hubungan yang sehat dengan teman-temannya, sehingga memperkuat perasaan kesepian. Jika tidak ditangani, diskriminasi juga dapat memperkuat stereotip negatif, menciptakan ketidakadilan, dan mengganggu harmoni dalam lingkungan sekolah. Tindakan diskriminatif dapat diartikan sebagai perilaku yang menghalangi, merusak kemajuan, atau bahkan membahayakan kehidupan individu yang tergabung dalam kelompok yang menjadi sasaran prasangka tertentu (Ihsani, 2024:4).

Dalam menangani isu diskriminasi di lingkungan sekolah, Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan pendekatan yang efektif. Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan (Rosalin,

2020:6). Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah strategi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif serta mencegah diskriminasi. Konsep ini menekankan betapa pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, mengakui keragaman, dan melindungi hak-hak anak di setiap aspek kegiatan sekolah.

Sekolah Ramah Anak (SRA) menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua siswa dengan menerapkan kebijakan yang menjunjung kesetaraan, melibatkan semua pihak di lingkungan sekolah, dan mendidik guru tentang cara menangani diskriminasi. Konsep ini juga mendorong hubungan yang baik antara siswa dan karyawan sekolah, yang menghasilkan budaya kerja sama dan menghargai satu sama lain. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, SRA mencegah diskriminasi dan membentuk generasi yang lebih toleran dan kuat. Sekolah Ramah Anak (SRA) berusaha melindungi dari kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan diskriminasi baik dari sesama siswa, guru, maupun lingkungan sekitar. SRA menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap diskriminasi, yang menjadi landasan utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.

Sekolah Ramah Anak (SRA) memiliki tujuan untuk lebih peduli terhadap perlindungan anak dan memastikan bahwa setiap anak merasa dihargai, aman, dan diperlakukan secara adil tanpa memandang agama, gender, kondisi fisik, atau status sosialnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal tersebut menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk memastikan setiap anak memiliki kehidupan yang layak dengan hak-hak mereka, seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan lainnya. Perlindungan ini juga mencakup pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat mengancam kesejahteraan anak, sehingga anak-anak dapat hidup secara bermartabat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh UNICEF (*United Nations Children's Fund*) Indonesia dalam Konvensi Hak Anak Pasal 2 (UNICEF Indonesia, 1990) menyebutkan bahwa :

“Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain”.

Namun masih terlihat permasalahan di Indonesia bentuk-bentuk diskriminasi di lingkungan sekolah terkhususnya di kota medan, contohnya dua Guru SMP yang Hina Siswa Bodoh dan Miskin (Molana, 12 Desember 2022) permasalahan lainnya orangtua protes perlakuan diskriminatif Guru terhadap Siswa Kelas (Puspitasari, 12 Desember 2024) serta Kasus Diskriminasi Siswa Akibat Tunggakan SPP (Unismuh, 13 Januari 2025). Hal tersebut mejadi bukti bahwa masih terdapat berbagai permasalahan terkait diskriminasi di lingkungan sekolah. Padahal, sekolah seharusnya menjadi tempat yang mendukung pertumbuhan akademik, pengembangan karakter, serta keterampilan sosial siswa.

Namun realitasnya menunjukkan bahwa kasus-kasus diskriminasi masih sering terjadi, yang menunjukkan adanya kesenjangan dari keadaan yang seharusnya dan realitasnya (*research gap*). Kesenjangan ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor penyebab serta mencari solusi yang efektif dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang benar-benar inklusif dan ramah bagi semua siswa.

Dalam dunia pendidikan, upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari diskriminasi menjadi bagian penting dari pembentukan karakter peserta didik. Salah satu pendekatan yang relevan untuk mengkaji hal ini adalah melalui tinjauan keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang menekankan pada penguatan nilai-nilai Pancasila, kesadaran berkonstitusi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keilmuan PPKn bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, berkepribadian positif, berpikiran luas, berperilaku bijak, serta memahami nilai-nilai dasar bangsa dan bersikap demokratis secara beradab (Sari et al., 2024:5).

Pendidikan Kewarganegaraan memegang peran penting dalam menanamkan nilai-nilai ideologis Pancasila, terutama nilai kemanusiaan dan kepribadian mulia, yang menjadi dasar bagi pembentukan warga negara yang berpikir dan bertindak secara global sesuai dengan tujuan pendidikan tersebut (Mutia et al., 2022:2). Keilmuan PPKn merupakan bidang yang membahas bagaimana membentuk warga negara yang baik, yaitu yang paham hak dan kewajibannya, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menghargai perbedaan, dan berperilaku sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. Keilmuan ini tidak

hanya fokus pada pengetahuan tentang negara dan hukum, tetapi juga mendidik hal ini, PPKn berperan penting dalam membentuk karakter siswa agar menjadi siswa agar bisa hidup bersama secara damai, adil, dan saling menghargai. Dalam warga negara yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sosialnya.

Penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan keilmuan PPKn karena membahas pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, adil, dan inklusif bagi semua peserta didik. Salah satu aspek utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pendidikan di sekolah dapat mencegah terjadinya diskriminasi dan mengajarkan nilai-nilai persamaan hak serta penghargaan terhadap setiap individu. Dalam konteks ini, keilmuan PPKn memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mengembangkan pendekatan pendidikan yang menekankan pada penguatan karakter siswa sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan egaliter. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus keilmuan PPKn, tetapi juga memberikan kontribusi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sekolah, sehingga dapat membentuk warga negara yang lebih peduli terhadap keberagaman dan saling menghargai. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bentuk pendidikan nilai dan karakter yang membuka ruang kolaborasi antara sekolah dan keluarga, serta antara guru dan orang tua, untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna. Tujuannya adalah membentuk warga negara yang memiliki karakter kuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan memiliki moral yang baik (Mutia et al., 2022:5). Moral adalah nilai yang menunjukkan kebaikan dalam tindakan. Seseorang dianggap bermoral jika perilakunya sejalan dengan nilai-nilai

yang dihargai masyarakat. Moral juga membantu membedakan benar dan salah serta membimbing sikap dan perilaku seseorang (Sihite et al., 2023:5).

Tindakan diskriminatif di lingkungan sekolah menunjukkan belum optimalnya penanaman kompetensi kewarganegaraan. Kompetensi kewarganegaraan terdiri dari tiga komponen utama yang saling melengkapi, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Sikap atau perilaku kewarganegaraan (*civic disposition*) yang menjadi bagian dari kompetensi utama dalam pengembangan karakter dan jati diri sebagai warga negara (Manalu & Gandamana, 2023:3).

Diskriminasi merupakan wujud nyata dari melemahnya *civic disposition* dalam diri individu maupun kelompok. Ketika sikap kewarganegaraan yang meliputi rasa toleransi, keadilan, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman tidak terbentuk dengan baik, perilaku membeda-bedakan dan perlakuan tidak adil mudah muncul. Dengan kata lain, diskriminasi adalah cerminan dari kurangnya kesadaran dan sikap positif sebagai warga negara yang menghargai perbedaan. Oleh karena itu, penguatan *civic disposition* sangat penting sebagai upaya untuk menghilangkan diskriminasi dan membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Komponen *civic knowledge* dan *civic skills* saling berkaitan erat dengan *civic disposition* dalam membentuk warga negara yang berkarakter inklusif. Pengetahuan tentang hak, kewajiban, dan nilai-nilai dasar kebangsaan (*civic knowledge*) menjadi landasan agar individu memahami pentingnya penghormatan

terhadap perbedaan. Sementara keterampilan seperti berpikir kritis, berkomunikasi, dan berpartisipasi aktif (*civic skills*) memungkinkan seseorang menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata. Ketiganya bersinergi untuk membentuk sikap (*civic disposition*) yang kuat, sehingga mencegah munculnya perilaku diskriminatif dan mendukung terciptanya kehidupan sosial yang adil dan harmonis.

Sekolah Menengah Pertama Swasta Kesatria Medan merupakan sekolah yang menerapkan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dibuktikan dengan keberhasilannya masuk dalam 10 besar “Sekolah Ramah Anak” se-Kota Medan, bersama dengan 4 sekolah swasta lainnya dan 6 sekolah negeri. Prestasi ini diraih melalui proses seleksi yang ketat, di mana dari 109 sekolah di Kota Medan, setiap sekolah harus memenuhi berbagai kriteria, termasuk lingkungan fisik yang aman, pendekatan pengajaran yang inklusif, serta program-program yang mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan siswa. Berdasarkan pencapaian tersebut, penting untuk melihat bagaimana implementasi program Sekolah Ramah Anak di SMP Swasta Kesatria Medan dalam mencegah diskriminasi di lingkungan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kebijakan dan program SRA diterapkan serta bagaimana efektivitasnya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang adil, setara, dan bebas dari perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam sehingga saya memutuskan untuk mengangkat judul skripsi **“Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) dalam Mencegah Diskriminasi di SMP Swasta Kesatria Medan”**.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Kurangnya pemahaman guru dan tenaga kependidikan mengenai bentuk-bentuk diskriminasi dan cara penanganannya di lingkungan sekolah;
2. Kurangnya kebijakan atau peraturan yang tegas dalam menangani kasus diskriminasi di sekolah;
3. Minimnya pelatihan dan sosialisasi terkait pencegahan diskriminasi bagi seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, dan staf administrasi;
4. Kurangnya mekanisme pengaduan yang efektif bagi siswa yang menjadi korban diskriminasi di sekolah;
5. Masih terjadinya masalah diskriminasi di lingkungan sekolah SMP Swasta Kesatria Medan.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas, diperlukan pembatasan masalah yang bertujuan untuk memperjelas fokus penelitian serta memastikan bahwa tujuan penelitian dapat dicapai secara efektif. Oleh karena itu, batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan untuk mengarahkan pembahasan pada aspek-aspek yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Implementasi program Sekolah ramah Anak dalam mencegah diskriminasi
2. Faktor mendukung dan menghambat implementasi Sekolah Ramah Anak.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan identifikasi masalah dan batasan masalah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi program Sekolah Ramah Anak dalam mencegah Diskriminasi di SMP Swasta Kesatria Medan?
2. Bagaimana faktor yang mendukung dan menghambat implementasi Sekolah Ramah Anak di SMP Swasta Kesatria Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Sekolah Ramah Anak dalam mencegah Diskriminasi?
2. Untuk melihat bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi Sekolah Ramah Anak?

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memperkaya literatur dalam bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai salah satu upaya pencegahan diskriminasi di lingkungan sekolah.
 - b. Hasil penelitian ini menganalisis pelaksanaan kebijakan sekolah ramah anak, sehingga dapat menjadi rujukan teoretis untuk

memahami peran kebijakan dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif dan bebas dari diskriminasi.

- c. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji lebih mendalam tentang hubungan antara implementasi SRA dan upaya pencegahan diskriminasi di lingkungan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam memahami secara mendalam konsep dan implementasi Program Sekolah Ramah Anak (SRA). Dan melatih kemampuan penulis dalam menganalisis pencegahan diskriminasi di lingkungan sekolah.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi SMP Swasta Kesatria Medan dalam meningkatkan pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak (SRA), khususnya dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan bebas diskriminasi.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak dan bebas diskriminasi, serta mendorong partisipasi aktif dalam mendukung program tersebut.

BAB II **KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Sekolah ramah Anak (SRA)

Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan institusi pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal, yang dirancang untuk memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan khusus, termasuk menyediakan mekanisme pengaduan untuk menangani berbagai kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan (Rosalin, 2020: 6). Prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak dasar anak, yang meliputi pemastian kepentingan terbaik bagi anak, penerapan sikap non-diskriminasi, pemberian ruang untuk partisipasi aktif anak, perlindungan terhadap hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta pengelolaan sekolah yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan anak.

Program Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan suatu program yang dirancang untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak serta memberikan perlindungan selama mereka berada di lingkungan sekolah. Penyelenggaraan program ini harus mengacu pada sejumlah prinsip dasar, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penciptaan lingkungan yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan anak, pembinaan secara menyeluruh kepada setiap anak, penghormatan terhadap pandangan anak, serta penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Arpani & El Muhtaj, 2023:7).

Untuk menciptakan Sekolah Ramah Anak (SRA), ada enam komponen utama yang harus dipenuhi. Pertama, kebijakan SRA, yang mencerminkan komitmen daerah dan sekolah melalui deklarasi, Surat Keputusan (SK) tim SRA,